

**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023**

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

**Tabel 1.1
Capaian Indikator Kinerja Makro**

NO	Indikator Kinerja Marko	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan %
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,30	73,04	1,02
2	Angka Kemiskinan	15,08	15,49	2,72
3	Angka Pengangguran	6,23	6,22	-0,16
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,27	4,35	1,87
5	Pendapatan Per-Kapita	51.885,54	55.626,38	7,21
6	Ketimpangan Pendapatan	0,287	0,291	1,39

Sumber data: Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator guna mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. Angka IPM memberikan gambaran universal terhadap tingkat pencapaian pembangunan manusia, semakin tinggi nilai IPM menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. IPM Kab. Dharmasraya di tahun 2023 tumbuh 2,17% dibandingkan tahun 2020, dengan capaian IPM sebesar 73,87 klasifikasi pembangunan manusia di Kab. Dharmasraya tergolong pada kategori tinggi. Berdasarkan empat komponen pembentuk IPM, pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 2,15% yaitu dari 11.324 ribu rupiah/orang/tahun tahun 2022 meningkat ke 11.650 ribu rupiah/orang/tahun yang dipicu oleh kenaikan harga barang.

Tabel 1.2
Capaian IPM Kab. Dharmasaraya Tahun 2022-2023

No	Komponen IPM	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Umur Harapan Hidup	73.84	74.04
2	Harapan Lama Sekolah	12.51	12.68
3	Rata-rata Lama Sekolah	8.56	8.71
4	Pengeluaran	11650	11901

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024

2. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kab. Dharmasaraya tetap kurun dua tahun terakhir pada angka 5,56. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, Kab. Dharmasaraya merupakan kabupaten/kota dengan garis kemiskinan tertinggi no. 5 di Sumatera Barat, dengan garis kemiskinan tahun 20221 Rp. 530.183,- naik 5,47% menjadi Rp. 581.058,- tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan adanya penyesuaian harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan (P1) merupakan dimensi penting dalam menganalisis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan penurunan 43,24% dari 0,74 tahun 2022 turun ke 0,42 tahun 2023. Hal ini memberikan makna positif yaitu rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang memberikan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin juga turut menunjukkan perbaikan 82,50% dari 0,16 tahun 2022 menurun ke 0,06 tahun 2023.

Tabel 1.3
Indikator Kemiskinan Kabupaten Dharmasaraya

No	Indikator Kemiskinan	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Miskin (Rp)	15,08	15,49
2	Persentase Penduduk Miskin	5,56	5,56
3	P1	0,74	0,42
4	P2	0,16	0,06
5	Garis Kemiskinan (Rp)	530.693	581.058

Sumber : BPS Sumatera Barat Tahun 2024

3. Angka Pengangguran

Indikator kinerja makro ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. TPT Kab. Dharmasraya Tahun 2023 menurun 0,16% dibandingkan tahun 2022. Dengan jumlah angkatan kerja tahun 2023 sebanyak 164.870 orang dan TPT sebesar 6,22%.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Total perekonomian Kab. Dharmasraya pada tahun 2023 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha tercatat sebesar 13.345,77 milyar. atau jika diukur Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB tersebut sebesar 8.387,15 milyar. Dengan besaran tersebut, ekonomi Kab. Dharmasraya tercatat tumbuh sebesar 1,87% dari 4,27% tahun 2022 meningkat menjadi 4,35% tahun 2023.

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Dharmasraya (persen), 2022-2023

LAPANGAN USAHA		2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.96	3.03
B	Pertambangan dan Penggalian	1.50	2.34
C	Industri Pengolahan	1.62	1.76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.36	4.25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2.27	-0.88
F	Konstruksi	2.04	6.10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.84	5.31
H	Transportasi dan Pergudangan	4.38	5.47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.50	6.58
J	Informasi dan Komunikasi	6.29	7.88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.70	3.90
L	Real Estat	4.03	6.20
M.N	Jasa Perusahaan	6.63	6.45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15.90	1.71
P	Jasa Pendidikan	4.56	2.04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.39	6.80
R,S,T,U	Jasa lainnya	11.46	6.92

	PDRB Dharmasraya	1.96	3.03
--	-------------------------	------	------

Sumber : Badan Pusat Statistik, Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2024

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kab. Dharmasraya disumbang oleh 16 sektor lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor konstruksi 199%, pertambangan penggalian 56%, perikanan, kehutanan dan perikanan 55%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 55, real estat 54%, pengadaan listrik dan gas 27% dan informasi dan komunikasi 25% . Sedangkan kontraksi terdalam perlambatan pertumbuhan ekonomi disumbangkan lima sektor yakni administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib -89,25%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang -61,23%, penyediaan akomodasi makan minum -58%, jasa pendidikan -55%, jasa lainnya -40% dan jasa keuangan dan asuransi -32%

5. PDRB Perkapita

PDRB perkapita digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. PDRB perkapita ADHB Kab. Dharmasraya mengalami akselerasi 7,21% dari 51,89 juta/jiwa/tahun ke 55,63 juta/jiwa/tahun tahun 2023, begitupun dengan capaian PDRB Perkapita ADHK 2010 meningkat 2,55% dari 34,08 juta/jiwa/tahun tahun 2022 ke 34,96 juta/jiwa/tahun tahun 2023.

Tabel 1.5
PDRB Perkapita Kabupaten Dharmasraya

No	Indikator	2021	2022	2023
1	PDRB Perkapita ADHB (Juta/Rp/Tahun)	46,45	51,89	55,63
2	PDRB ADHK Perkapita (Juta/jiwa/Tahun)	33,29	34,09	34,96

Sumber : Badan Pusat Statistik, Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2024

6. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Angka ketimpangan pendapatan/*gini ratio* merupakan ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0-1, nilai 0 sampai 0,3 berarti ketimpangan rendah, antara 0,3 sampai 0,5 berarti ketimpangan sedang dan antara 0,5 sampai 1 yang berarti ketimpangan tinggi, semakin tinggi nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh bahwa nilai ketimpangan pendapatan Kab. Dharmasraya tahun 2023 adalah sebesar 0,291 mengalami kenaikan 1,39% dibandingkan tahun tahun 2021 yang berarti di Kab. Dharmasraya distribusi pendapatan penduduk cukup merata dengan klasifikasi ketimpangan rendah.

B. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di	90,0723058	Sumber data dari Dinas Pendidikan dan

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
	Pelayanan Dasar		tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	satuan PAUD = 7.848 Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 8.713		Disdukcapil
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 26.840 Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 26.995	99,4258196	Sumber data dari dinas pendidikan dan disdukcapil
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 11.599 Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 13.746	84,3809108	Sumber data dari dinas pendidikan dan disdukcapil
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 782 Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 782	100	Sumber data dari dinas pendidikan
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 237 Jumlah Penduduk di kabupaten/kota	0,9969545	Sumber data dari Dinas Kesehatan

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
				= 237.724		
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 2 Jumlah RS di kabupaten/kota = 2	100	Sumber data dari Dinas Kesehatan
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 3.808 Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 3.808	100	Sumber data dari Dinas Kesehatan
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 3.551 Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 3.561	99,71918	Sumber data dari Dinas Kesehatan
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 3.562 Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 3.562	100	Sumber data dari Dinas Kesehatan
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 16.511 Jumlah balita di kabupaten/kota = 16.511	100	Sumber data dari Dinas Kesehatan
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 39.587 Jumlah anak usia pendidikan dasar di	100	Sumber data dari Dinas Kesehatan

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
				kabupaten/kota = 39.587		
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 137.212 Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 137.212	100	Sumber data dari Dinas Kesehatan
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 17.551 Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 17.551	100	Sumber data dari Dinas Kesehatan
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 22.191 Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 22.191	100	Sumber data dari Dinas Kesehatan
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 3.133 Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 3.133	100	Sumber data dari Dinas Kesehatan
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 447 Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	100	Sumber data dari Dinas Kesehatan

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
				= 447		
1.b.13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2.544 Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 2.544	100	Sumber data dari Dinas Kesehatan
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 4.922 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 4.922	100	Sumber data dari Dinas Kesehatan
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1	-	Secara kewenangan wilayah Sungai Batang Hari bukan kewenangan Kabupaten Dharmasraya
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai	-	Kabupaten Dharmasraya secara geografis tidak memiliki wilayah pantai/laut

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
				rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 1		
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 1.601 luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 2.205	72,6077098	sumber data dari dinas PUPR
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 52.131 Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 58.526	89,0732324	sumber data dari dinas PUPR

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 54.134 Jumlah rumah di Kabupaten A = 58.526	92,495643	sumber data dari dinas PUPR
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 7.431 Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 7.431	100	sumber data dari dinas PUPR
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 612,21 Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 1.052,66	58,1583797	sumber data dari dinas PUPR
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 38 Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	76,00	Sumber data dari Dinas PUPR

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
				= 50		
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 136 Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 136	100	Sumber data dari Dinas PUPR
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 0 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 1	-	Tidak ada terjadi bencana di Kab. Dharmasraya tahun 2022, maka rumah yang menjadi target SPM untuk jenis layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota tidak ada ditahun 2023
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima	100	Sumber data dari Dinas Perkimtan

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
			pemerintah kabupaten/kota	Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 2 Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 2		
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 4,7 Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 107,98	4,3534642	Sumber data dari Dinas Perkimtan
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 5.021 Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 58.993	8,5111793	Sumber data dari Dinas Perkimtan
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 46 Jumlah unit rumah kab/kota = 46	100	Sumber data dari Dinas Perkimtan
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 15 Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 15	100	Sumber data dari Satpol PP dan Damkar
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 5 Jumlah	100	Sumber data dari Satpol PP dan Damkar

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
				keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 5		
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 2.486 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 2.486	100	Sumber data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 2.486 Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 2.486	100	Sumber data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 2.291 Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 2.291	100	Sumber data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 105 Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 105	100	Sumber data dari Satpol PP dan Damkar
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	11,39 menit	Sumber data dari Satpol PP dan Damkar
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 50 Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 50	100	Sumber data dari dinas sosialP3APP KB
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam	100	Sumber data dari dinas sosialP3APP KB

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
			kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}}{\text{satu tahun anggaran}} = 3.458$		
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota}} = 6$	100	sumber data dari Dinas Transnaker
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} = 11.651$	92,8810587	sumber data dari Dinas Transnaker
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} = 12.233,47$	97,5244739	sumber data dari Dinas Transnaker

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 37 Jumlah Perusahaan = 46	80,4347826	sumber data dari Dinas Transnaker
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 3.348 Jumlah pencaker yang terdaftar = 3.633	92,1552436	sumber data dari Dinas Transnaker
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 726.444.872.679 Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 982.267.918.085	73,955879	Sumber data dari dinas sosialP3APP KB
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 108 Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 108	100	Sumber data dari dinas sosialP3APP KB

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
2.g.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 21 Jumlah penduduk perempuan = 117.122	17,9300217	Sumber data dari dinas sosialP3APP KB
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 32,71 Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 40,47	80,8253027	sumber data dari Dinas Perikanan dan pangan
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 911,99 seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 911,99	100	Sumber data dari DPMPTSP
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 22.257,37 Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 22.257,37	100	sumber data dari dinas Perkimtan
2.i.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 911,99 Luas tanah di atas Kesesuaian	100	Sumber data dari DPMPTSP

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
				Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 911,99		
2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 0 Jumlah penerima tanah obyek landreform = 1	-	sumber data dari Dinas Perkimtan
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 58.661,27 Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 58.661,27	100	Sumber data dari Dinas Perkimtan
2.i.6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 9 Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 9	100	Sumber data dari Dinas Perkimtan
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		63,48	Sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 166.999 Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 207.504,93	80,4795337	Sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap adap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang	0	Sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
			diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 0 usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 12		
2.k.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 163.446 Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 171.011	95,576308	sumber data dari Disdukcapil
2.k.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 46.678 Jumlah anak usia 0-17 tahun = 70.504	66,2061727	sumber data dari Disdukcapil
2.k.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 71.663 Jumlah anak usia 0-18 tahun = 74.370	96,3600914	sumber data dari Disdukcapil
2.k.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 15 Jumlah PD = 38	39,4736842	sumber data dari Disdukcapil
2.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 2 Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 2	100	Sumber data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
2.l.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 17 Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 20	85	Sumber data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$	2,4	Sumber data dari Dinas SosialP3APP KB
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 31.465 Jumlah Pasangan Usia Subur = 36.578	86	Sumber data dari Dinas SosialP3APP KB
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 0 Jumlah Pasangan Usia Subur = 36.578	0	Sumber data dari Dinas SosialP3APP KB
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota		53	Sumber data dari Dinas Perhubungan
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	0,2191195	Sumber data dari Dinas Perhubungan
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 38 Jumlah PD = 38	100	Sumber data dari dinas komunikasi dan informatika

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 27 Jumlah Layanan Publik = 27	100	Sumber data dari dinas komunikasi dan informatika
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 177.184 Jumlah penduduk = 177.184	100	Sumber data dari dinas komunikasi dan informatika
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 49 Jumlah seluruh koperasi aktif = 67	73,1343284	sumber data dari Dinas Kumperdag
2.p.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 900 Jumlah usaha mikro keseluruhan = 1.582	56,8900126	sumber data dari Dinas Kumperdag
2.q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 1.126.589.549.297 Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 8.544.299.682.105	13,1852766	Sumber data dari DPMPTSP

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 15.221 Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 57.839	26,3161535	Sumber data dari Disbudparpora
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 34.561 jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 57.839	59,7537993	Sumber data dari Disbudparpora
2.r.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	8	Sumber data dari DisParPoraBud
2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 38 jumlah PD = 38	100	sumber data dari DISKOMINFO
2.s.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 38 jumlah PD = 38	100	sumber data dari DISKOMINFO
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 322 Jumlah area penilaian = 645	49,9224806	sumber data dari dinas komunikasi dan informatika

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
					Capaian (%)	Keterangan
2.u	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 102 Jumlah cagar budaya yang terdata = 102	100	Sumber data dari Disbudparpora
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		69	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		70,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)		95,99	Dinas perpustakaan dan kearsipan
2.w.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		83,5	Dinas perpustakaan dan kearsipan

C. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Hasil EPPD

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Selanjutnya pada Pasal 21 di jelaskan bahwa Hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan:

- a. pertimbangan pemberian penghargaan;
- b. sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan
- c. pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Berikut adalah hasil EPPD Kabupaten Dharmasraya:

Tabel 3.1
Peringkat, Nilai dan Prestasi Kinerja EPPD Kabupaten Dharmasraya
untuk Kabupaten Secara Nasional

No.	LPPD Tahun	Peringkat Nasional	Skor	Status	Dasar Hukum
1.	LPPD 2015 EPPD 2016	231	2.8124	Tinggi	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016
2.	LPPD 2016 EPPD 2017	120	3.1226	Sangat Tinggi	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018
3.	LPPD 2017 EPPD 2018	37	3.1551	Sangat Tinggi	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 tahun 2018
4.	LPPD 2018 EPPD 2019		3.5138	Sangat Tinggi	Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri Tanggal 25 April 2020
5.	LPPD 2019 EPPD 2020				Tidak Diumumkan
6.	LPPD 2020 EPPD 2021				Tidak Diumumkan
7.	LPPD 2021 EPPD 2022	43	2,88	Sedang	Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.3-1109 Tahun 2023
8.	LPPD 2022	9	3,5036	Tinggi	Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.7-6646 Tahun

No.	LPPD Tahun	Peringkat Nasional	Skor	Status	Dasar Hukum
	EPPD 2023				2023
9.	LPPD 2023 EPPD 2024				Masih Dalam Proses

2. Opini atas Laporan Keuangan Kabupaten Dharmasraya 10 Tahun Terakhir

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan professional dalam memeriksa tanggung jawab keuangan negara, telah memeriksa Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar Akutansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektifitas system pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

No.	Tahun	Opini Laporan Keuangan	Keterangan
1.	2014	WDP	
2.	2015	WTP	
3.	2016	WTP	
4.	2017	WTP	
5.	2018	WTP	
6.	2019	WTP	
7.	2020	WTP	
8.	2021	WTP	
9.	2022	WTP	
10.	2023		Masih menunggu hasil dari BPK

D. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tabel 4.3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pendapatan		
Pendapatan Asli Daerah		
- Pendapatan Pajak	23.850.981.411,00	23.692.000.465,50
- Pendapatan Retribusi Daerah	3.456.738.885,00	2.449.560.848,00
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.832.210.107,00	4.832.210.107,00
- Lain-lain Pendapatan Hasil Daerah yang Sah	78.087.093.333,00	85.022.257.585,15
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	110.227.023.736,00	115.996.029.005,65
Pendapatan Transfer		

Transfer Pemerintah Pusat DanPerimbangan		
- Dana Bagi Hasil Pajak	13.626.961.000,00	15.830.852.055,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	8.398.374.000,00	19.414.761.014,00
- Dana Alokasi Umum (DAU)	489.147.384.000,00	489.147.246.531,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	186.618.923.907,00	183.418.901.715,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	697.791.642.907,00	707.811.761.315,00
Tranfer Pemerintahan Pusat- Lainnya		
- Dana Insentif Daerah	8.601.217.000,00	8.601.217.000,00
- Dana Desa	54.488.661.000,00	54.485.661.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	63.089.878.000,00	63.086.878.000,00
Tranfer Pemerintah Provinsi		
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	67.546.841.362,00	48.627.484.675,00
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
- Bantuan Keuangan	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	67.546.841.362,00	48.627.484.675,00
Total Pendapatan Transfer		
Lain-lain Pendapatan yang Sah		
- Pendapatan Hibah	3.200.000.000,00	1.991.137.370,00
- Pendapatan Dana Darurat	-	-
- Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	3.200.000.000,00	1.991.137.370,00
Jumlah Pendapatan	941.855.386.005,00	937.513.290.365,65
Belanja		
Belanja Operasi		
- Belanja Pegawai	399.766.874.955,00	373.990.257.238,00
- Belanja Barang	285.840.493.202,00	278.076.015.874,40
- Bunga	-	-
- Subsidi	-	-
- Hibah	29.122.932.580,00	28.767.442.546,00
- Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja Operasi	714.730.300.737,00	680.833.715.658,76
Belanja Modal		
- Belanja Tanah	-	-
- Belanja Peralatan dan Mesin	41.345.977.665,00	39.031.009.865
- Belanja Gedung dan Bangunan	56.200.220.019,00	45.091.507.154,00
- Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	51.343.724.700	50.167.680.309,00
- Belanja Aset Tetap Lainnya	698.426.400,00	242.499.170,00
Jumlah Belanja Modal	152.416.828.609,00	137.284.235.323,00

Belanja Tak Terduga		
Belanja Tak Terduga	4.154.380.709,00	3.924.380.709,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	4.154.380.709,00	3.924.380.709,00
Jumlah Belanja	871.301.510.055,00	822.042.331.690,76
Transfer		
Transfer/ Bagi Hasil Ke Desa		
- Bagi Hasil Pajak	2.385.098.880,00	1.107.049.776,00
- Bagi Hasil Retribusi	345.673.150,00	110.265.502,00
- Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	108.235.636.000,00	108.235.636.000,00
Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Desa	110.966.408.030,00	109.452.951.278,00
Jumlah Belanja dan Transfer	982.267.918.085,00	931.495.282.968,76
Surplus / (Defisit)	(40.412.532.080,00)	6.018.007.396,89
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan		
- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	41.912.532.080,00	41.912.532.080,00
- Pencairan Dana Cadangan	-	-
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
- Pinjaman Dalam Negeri	-	-
- Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-
Jumlah Penerima	41.912.532.080,00	41.912.532.080,00
Pengeluaran Pembiayaan		
- Pembentukan Dana Cadangan	-	-
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
- Pembayaran Pokok Utang		
- Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Pengeluaran	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	40.412.532.080,00	40.412.532.080,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggran (SiLPA) Sebelum Koreksi	-	46.430.539.477,00
Koreksi SiLPA	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Setelah Koreksi	-	46.430.539.477,05

E. Inovasi Daerah

Merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017, inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah

bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. untuk mencapai tujuan dimaksud, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023, Indeks Inovasi daerah Kabupaten Dharmasraya adalah 55,61 dengan predikat Inovatif.